

Pembelian Pesawat Tempur Dassault Rafale sebagai Implementasi *Strategic Hedging* Indonesia di Indo-Pasifik

Alfin Febrian Basundoro
Universitas Gadjah Mada

Abstrak

*Pada tanggal 10 Februari 2022, Indonesia dan Prancis telah menyetujui kesepakatan pembelian pesawat tempur Dassault Rafale. Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto dan Menteri Pertahanan Prancis, Florence Parly. Pembelian Dassault Rafale merupakan suatu langkah signifikan guna memperkuat alutsista TNI Angkatan Udara (TNI AU) yang hingga kini memiliki efek penggentar yang minim. Apalagi, posisi geopolitik Indonesia di kawasan Indo-Pasifik cukup rawan, dengan memanasnya ketegangan di kawasan Indo-Pasifik seiring dengan ekspansi militer Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Laut Tiongkok Selatan. Di sisi lain, Amerika Serikat (AS) selalu berupaya membendung ekspansi tersebut dengan beragam upaya strategis. Analisis ini berfokus pada pembelian pesawat tempur tersebut yang merupakan tindakan rasional untuk memperkuat pertahanan udara Indonesia. Dengan pendekatan teoritis *Strategic Hedging*, analisis ini berargumen bahwa pembelian pesawat tempur dari Prancis ini merupakan implementasi strategis untuk menghadapi pusaran konflik di Indo-Pasifik. Dengan memperkuat kemitraan strategis dengan Prancis melalui pembelian Dassault Rafale, Indonesia dapat memperoleh keuntungan berupa transfer teknologi dan memiliki daya tawar yang lebih kuat sekaligus menghindari ancaman dan tekanan dari AS dan RRT di kawasan dan konflik geopolitik yang kemungkinan dapat terjadi.*

Kata Kunci: *Dassault Rafale; Indonesia; Prancis; TNI AU; Strategic Hedging*

Abstract

*On February 10, 2022, Indonesia agreed to purchase Dassault Rafale fighter aircraft from France. The agreement was signed by Indonesian Defense Minister Prabowo Subianto and French Minister of Armed Forces Florence Parly. It is a significant step to strengthen the capability of the Indonesian Air Force (TNI AU), which has had minimal deterrence force. Moreover, Indonesia's geopolitical position in the Indo-Pacific is quite vulnerable, with tensions heating up in the region as the military expansion of the People's Republic of China (PRC) in the South China Sea. On the other hand, the United States (US) is also trying to contain the Chinese expansion with various strategic efforts. This analysis focuses on the acquisition of these fighters as a rational approach to strengthen Indonesia's aerial defenses. By employing the concept of *Strategic Hedging*, this analysis argues that the fighter acquisition from France is a strategic implementation to deal with the tension in the Indo-Pacific. By strengthening its strategic partnership with France via purchasing the Dassault Rafale, Indonesia could gain benefit from technology transfer and have more substantial bargaining power while avoiding threats and pressure from the US and PRC in the region and geopolitical conflicts that may occur.*

Keywords: *Dassault Rafale; Indonesia; France; TNI AU; Strategic Hedging*

Pendahuluan

Indonesia memiliki wilayah geografis yang luas dengan total luas mencapai lebih dari lima juta kilometer persegi. Selain wilayah darat dan laut, ruang udara Indonesia juga teramat luas—menuntut Indonesia memiliki sistem pertahanan ruang udara efektif yang terutama digawangi oleh TNI Angkatan Udara (TNI AU). Dalam upaya untuk menciptakan pertahanan udara yang efektif tersebut, kepemilikan dan pengelolaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang modern dan mampu menciptakan efek penggentar. Dalam kajian strategis, Freedman (2020) menggarisbawahi bahwa efek penggentar adalah efek yang ditimbulkan dari kepemilikan persenjataan atau infrastruktur militer tertentu untuk mencegah negara lain menyerang negara yang bersangkutan. Keberadaan efek penggentar menjadikan suatu negara memiliki daya tawar yang lebih tinggi terhadap negara lain yang berpotensi menjadi pengancam.

Hingga saat ini kualitas dan kuantitas alutsista TNI AU masih belum memadai, khususnya dari segi efek penggentar. Banyak pesawat tempur dan peluru kendali tua yang masih dioperasikan. Belum lagi, rasio antara jumlah pesawat tempur dengan luas ruang udara teyang harus dikawal TNI AU sangat minim. Ditambah, TNI AU belum memiliki perencanaan operasi udara yang mampu menangkal ancaman eksternal (RSIS 2014). Kelemahan-kelemahan tersebut berdampak pada meningkatnya kerawanan ruang udara Indonesia. Misalnya, Indonesia seringkali mengalami pelanggaran ruang udara oleh negara-negara tetangga, misalnya Australia dan Singapura. Sebagaimana dinyatakan oleh Kepala Staf Komando Operasi Udara Nasional (Koopsudnas) Marsda TNI Novyan Samyoga, hingga pertengahan tahun 2021, telah terjadi 498 kali pelanggaran wilayah udara, di mana kebanyakan di antaranya terjadi di wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) (Permana 2021). TNI AU seringkali gagal merespons secara cepat dan tepat pelanggaran udara tersebut.

Seiring dengan memanasnya kawasan Indo-Pasifik sejak dasawarsa belakangan, negara-negara besar di kawasan ini melakukan proyeksi kekuatan secara intensif dalam rangka kontestasi geopolitik (Mitchell 2016). Apalagi, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) juga menggelar kekuatannya sebagai pendukung klaimnya atas Laut Tiongkok Selatan (LTS) dan kepulauan di dalamnya. Ditambah lagi, sejak tahun 2016, RRT berulang kali melakukan provokasi di perairan Natuna Utara. Pada tahun 2021, RRT bahkan melayangkan protes atas eksplorasi sumber daya mineral yang dilakukan Indonesia di kawasan perairan tersebut, padahal sudah jelas bahwa kawasan tersebut merupakan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia berdasarkan aturan UNCLOS yang menjadi hak berdaulat Indonesia.

Di sisi lain, Amerika Serikat (AS) sebagai rival utama RRT di kawasan itu berupaya mendorong terwujudnya tatanan geopolitik untuk membendung ekspansi pengaruh RRT. AS misalnya memberlakukan Operasi Kebebasan Bernavigasi (*Freedom of Navigation Operations* atau FONOPS) di sekitar Laut Tiongkok Selatan yang memungkinkan masuknya kapal-kapal perang AS dan sekutunya yang menjadi potensi lain bagi pelanggaran kedaulatan wilayah Indonesia (Choong 2019). AS juga berupaya mengkonsolidasikan negara-negara sekutunya di Indo-Pasifik dalam kerangka kerja sama organisasi internasional, seperti Quad dan AUKUS (Buchan & Rimland 2020; Delanova 2021). Terkhusus AUKUS, forum tersebut juga tengah mengembangkan aneka alutsista strategis seperti kapal selam nuklir yang turut berpotensi melanggar kedaulatan Indonesia (Delanova 2021).

Tentunya kondisi ini juga menjadi tekanan geopolitik tersendiri bagi Indonesia yang tidak memiliki efek penggentar dan daya tawar politik yang signifikan. Keterbatasan ini membuat Indonesia sulit untuk membebaskan diri dari tekanan tersebut dan rawan dipengaruhi oleh dua negara besar di atas. Apalagi, Indonesia masih menjalin relasi yang baik dengan RRT dan AS dan pengaruh keduanya di Indonesia dalam bidang politik dan ekonomi relatif kuat. Maka, skema *strategic hedging* menjadi pilihan strategis yang paling rasional bagi Indonesia dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya, tekanan geopolitik, dan prinsip politik luar negeri yang diusungnya, di mana Indonesia perlu mencari mitra strategis alternatif untuk meningkatkan daya tawar geopolitiknya.

Sebagai instrumentasi strategi ini, salah satu langkah signifikan Indonesia adalah memperkuat militernya dengan membeli pesawat tempur Dassault Rafale dari Prancis. Pembelian tersebut disepakati pada bulan Januari 2022 dalam kunjungan Menteri Angkatan Bersenjata Prancis, Florence Parly, di Jakarta, di mana Indonesia diwakili oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Kedua pihak menyepakati pembelian 42 unit Dassault Rafale yang diawali dengan pengiriman enam unit pertama (Yuniar 2022). Situasi ini memunculkan sejumlah pertanyaan mengenai bagaimana pembelian pesawat tempur Dassault Rafale dapat menjadi instrumen krusial bagi *strategic hedging* Indonesia di kawasan. Pertanyaan lainnya muncul mengenai bagaimana prospek strategis yang dapat dimanfaatkan oleh Indonesia, khususnya menyangkut relasi bilateral dengan Prancis seiring dengan pembelian Dassault Rafale tersebut.

Sejumlah riset pendahulu terkait *strategic hedging* seperti karya Kusumasomantri (2015) yang membahas mengenai strategi *hedging* IndonesiaterhadapklaimteritorialTiongkokdilakukandenganmenerapkan beberapa kebijakan, diantaranya adalah pragmatisme ekonomi, *indirect balancing*, *dominance denial*, serta *binding engagement*, Kurniawan & Puspitasari (2017) yang membahas mengenai *hedging* maritim Indonesia

di tengah persaingan strategis India-China yang dilakukan dengan menjalin kerjasama maritim, dan Abrar & Syauqi (2018) berfokus pada tindakan *hedging* Indonesia secara diplomatis terhadap negara-negara besar. Di antaranya, adalah penamaan perairan Natuna Utara, meningkatkan diplomasi pertahanan di antara negara-negara ASEAN dalam lingkup ASEAN Defence Ministers' Meeting (ADMM), hingga memperkuat relasi dengan pihak eksternal seperti India. Di sisi lain, aspek *soft balancing* dengan memperkuat diplomasi pertahanan dengan pengadaan pesawat tempur cenderung belum menjadi topik fokus analisis. Maka, riset ini akan menempatkan pengadaan pesawat tempur Dassault Rafale sebagai komponen utama dari *strategic hedging* Indonesia di Indo-Pasifik dan relasi antara Indonesia-Prancis yang mengiringinya sebagai bentuk kemitraan alternatif Indonesia untuk menghindari ketidakpastian geopolitik di kawasan Indo-Pasifik.

Metode Penelitian

Dalam menjelaskan pembelian pesawat tempur Dassault Rafale dalam kerangka *strategic hedging*, analisis ini menggunakan metode kualitatif-analitis yang berfokus pada analisis studi kasus. Orientasi dari riset yang dilakukan adalah pada pendekatan induktif antara teori dengan kasus yang akan dialami. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini diperoleh dari data primer, yakni dari Pemerintah Republik Indonesia (Kementerian Pertahanan, TNI, Kementerian Luar Negeri), Pemerintah Prancis, dan organisasi internasional seperti ASEAN, NATO, Uni Eropa, dan sebagainya; serta data sekunder seperti artikel jurnal, laporan lembaga riset seperti IISS dan SIPRI, serta berita daring. Data-data tersebut berfokus pada (1) kekuatan militer Indonesia; (2) data dinamika geopolitik Indo-Pasifik; (3) relasi bilateral strategis antara Indonesia-Prancis; dan (4) data-data terkait teknis pesawat tempur Dassault Rafale itu sendiri.

Landasan Teoritis

Strategic hedging sendiri dijelaskan para ahli strategi sebagai “jalan tengah” antara *balancing* (mengimbangi kekuatan lawan) dan *bandwagoning* (tunduk pada kekuatan lawan dan berusaha bersikap sejalan dengan lawan). Kedua strategi tersebut memiliki konsekuensinya masing-masing. Keputusan suatu negara untuk melakukan *balancing* di satu sisi memerlukan sumber daya yang sangat masif untuk memperkuat kekuatan militernya dan memantapkan posisi geopolitik dengan menggandeng negara-negara lain sebagai sekutu (Walt 1988). Selain itu, *balancing* cenderung menciptakan perlombaan senjata (*arms race*) yang terus-menerus berlangsung dan tentunya kian sulit untuk diimbangi. Di sisi lain, *bandwagoning* membuat negara harus mengubah persepsi pihak lawan dengan cara tunduk kepada pengaruh dari lawan dan mengikuti

setiap keputusan yang diambil oleh lawan. Koga (2018) berargumen bahwa *strategic hedging* merupakan pilihan manakala suatu negara tidak memiliki cukup sumber daya untuk mengimbangi kekuatan lawan, namun memiliki kepentingan strategis yang tidak dapat serta-merta diserahkan kepada lawan dalam wujud *bandwagoning*.

Sementara Cheng-Chwee (2008) menyatakan bahwa tujuan *strategic hedging* adalah (1) menghindari tekanan dari pihak lawan yang tidak mampu dihadapi secara langsung menggunakan kekuatan; dan (2) melindungi kepentingan nasional sembari melakukan mitigasi jangka panjang dan memaksimalkan keuntungan yang dapat diperoleh. Prinsip *strategic hedging* sendiri tidak lepas dari keberadaan negara-negara berkekuatan kecil dan menengah (*small and middle power*) yang memiliki posisi geografis dekat atau di sekitar pusaran konflik geopolitik di kawasannya. Menurut Cheng-Cwee dalam Kusumasomantri (2015) juga bahwa *strategic hedging* dapat dilakukan dengan *limited bandwagoning*, perjanjian yang mengikat, pragmatisme ekonomi, penolakan pengakuan hegemoni, dan *indirect balancing*.

Vaicekauskaite (2017) membagi *strategic hedging* menjadi beberapa tindakan. Pertama, adalah *soft balancing*, yakni mengimbangi kekuatan militer aktor-lawan yang dilakukan secara bertahap dan mempertimbangkan skenario ancaman yang paling berisiko terjadi. Kedua, adalah *limited bandwagoning*, yakni negara beraliansi secara terbatas dengan negara-negara besar di sekitarnya sebatas untuk menjadi mitra kerja sama, alih-alih tunduk kepada tata aturan yang dibuat oleh negara tersebut. Ketiga, adalah *dominance denial*, yakni penentangan terhadap dominasi negara-negara besar dengan mengombinasikan kekuatan militer, politik luar negeri, dan diplomasi.

Analisis ini berfokus pada aspek tindakan *soft balancing* yang dilakukan Indonesia untuk mengimbangi kekuatan-kekuatan besar di kawasan dengan tujuan untuk melindungi kedaulatan Indonesia, khususnya di Laut Tiongkok Selatan dan menghindari pusaran konflik antara RRT dan AS yang lebih besar. Salah satu bentuknya adalah dengan memperkuat kekuatan udara dengan pembelian pesawat tempur Dassault Rafale dari Prancis. Sejumlah poin penting yang menjadi perhatian analisis ini adalah (1) urgensi peningkatan kekuatan udara Indonesia; (2) pemilihan Prancis sebagai negara mitra dalam pengadaan pesawat tempur; dan (3) prospek dan keuntungan yang akan diperoleh Indonesia dari pembelian pesawat tempur ini.

Hasil dan Pembahasan

Urgensi Peningkatan Kekuatan Tempur TNI Angkatan Udara

Angkatan udara merupakan komponen strategis dari kekuatan militer suatu negara. Peran penting angkatan udara dalam penegakan kedaulatan negara yakni (1) melakukan patroli dan pengawasan dalam bentuk ISR (*intelligence, surveillance, and reconnaissance*) terhadap ruang udara; (2) memberikan dukungan tempur dalam bentuk bantuan tembakan atau serangan preemtif terhadap musuh dalam operasi militer gabungan; dan (3) sebagai komponen dalam strategi anti-akses/tangkal wilayah (*anti-access/area denial*) yang memungkinkan negara mencegah masuknya kekuatan militer musuh sekaligus mencegah musuh mengontrol ruang udara (Tribowo *et al.* 2022). Apalagi, doktrin pertahanan TNI cenderung defensif, sehingga pesawat tempur yang memiliki peran untuk menjadi sarana patroli, penghalau musuh, dan penggentar diperlukan dalam jumlah signifikan.

Berbeda dengan angkatan darat yang kekuatan militernya cenderung dipengaruhi oleh jumlah personel—khususnya infanteri, kekuatan militer angkatan udara sangat dipengaruhi oleh teknologi (*technological-driven*) (Smith 2005). Maka, seharusnya menjadi kewajiban bagi negara kepulauan yang luas seperti Indonesia memiliki kekuatan udara yang memadai. Hanya saja, hingga saat ini, keterbatasan kekuatan udara TNI AU masih menjadi persoalan tersendiri yang harus dipecahkan. Menurut laporan *World Air Forces*, pada tahun 2022, TNI AU hanya memiliki total 259 pesawat dengan hanya 79 pesawat yang berkemampuan tempur dalam berbagai peran. (Hoyle 2022). Parahnya, menurut International Institute of Strategic Studies (IISS) dalam *Military Balance 2022* (2022), hanya 45% dari seluruh pesawat TNI AU yang berada dalam kondisi yang memadai untuk beroperasi (*combat-capable*). Jenis pesawat TNI AU yang berkemampuan tempur di antaranya adalah F-16, Sukhoi Su-27/30, Embraer EMB-314 Super Tucano, British Aerospace (BAe) Hawk 209, dan KAI T-50 Golden Eagle.

Hingga tahun 2022, jumlah satuan tempur TNI AU juga masih terbatas, yakni hanya delapan skuadron dalam tiga komando operasi angkatan udara (Koopsau)—tujuh skuadron pesawat tempur murni (*fighter*) berisikan F-16, Su-27/30, T-50 Golden Eagle, dan BAe Hawk 209—serta satu skuadron kontrainsurjensi yang beranggotakan 15 unit Super Tucano (IISS 2022). Kedelapan skuadron tersebut yakni Skadron Udara 12 dan 16 di Pangkalan TNI AU Roesmin Noerjadin, Pekanbaru, serta Skadron Udara 1 di Pangkalan TNI AU Supadio, Pontianak (TNI AU 2020). Sementara itu, lima skuadron lainnya menempati bagian dalam teritorial Indonesia, yakni di Madiun, Malang, dan Makassar (TNI AU 2020). Padahal,

sebagai negara dengan luas wilayah kawalan mencapai lebih dari lima juta kilometer persegi, idealnya TNI AU memiliki 10-15 skuadron tempur dengan penempatan yang seharusnya lebih tersentralisasi di kawasan perbatasan, seiring dengan tingkat ancaman yang harus dihadapi.

Tabel 1. Komparasi Kekuatan Angkatan Udara Negara-Negara ASEAN (2021)

Negara	Anggaran Militer (juta US\$)	Total Jumlah Pesawat	Jumlah Pesawat Berkemampuan Tempur
Brunei	457	26	0
Filipina	5.650	216	25
Indonesia	8.400	259	79
Kamboja	1.000	22	0
Laos	18,5	30	0
Malaysia	3.900	189	38
Myanmar	2.060	327	85
Singapura	11.300	319	105
Thailand	7.100	268	92
Vietnam	5.210	283	100

Source: IIS 2022, Hoyle 2022.

Di antara pesawat-pesawat tersebut, sebagian di antaranya belum memiliki teknologi yang cukup mutakhir untuk menghadapi ancaman masa kini. Pertama, F-16 TNI AU merupakan varian Blok 15 hingga 32 yang masih menggunakan teknologi 1990-an dan awal 2000-an dengan modifikasi fitur-fitur secara minimal agar menyerupai F-16 generasi yang lebih baru (Yahya 2020). Kedua, Sukhoi Su-27/30 yang dibeli Indonesia secara komposit pada 2006 dan berperan penting dalam mempertahankan superioritas udara masih belum memiliki teknologi radar termutakhir, yakni *active electronically scanned array* (AESA). Radar AESA merupakan radar yang mampu secara aktif dan independen mengarahkan gelombang untuk mendeteksi sasaran-sasaran.

Selain kurang apabila dibandingkan dengan luas wilayah yang harus dikawal, kekuatan tempur TNI AU tersebut juga kurang untuk menghadapi dinamika geopolitik kawasan Indo-Pasifik yang kian memanas, khususnya terkait dengan ancaman langsung dari negara-negara kekuatan besar. Sebagai contoh, Indonesia hingga saat ini tengah menghadapi intrusi maritim dari RRT dalam bentuk milisi maritim di perairan Natuna Utara. Keberadaan milisi maritim tersebut juga dikawal oleh kapal-kapal penjaga pantai dan Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat. Tercatat, pada tahun 2020, Indonesia harus menghadapi serbuan 1.000 kapal asing, di mana kapal milisi maritim mendominasi dengan 60 kapal antara Desember 2019 hingga Januari 2020 (CNN Indonesia 2020; Laksmana 2021). Apalagi, RRT dan Indonesia telah berulang kali beradu argumen dan tindakan diplomatik terkait dengan konflik di Natuna Utara tersebut.

Intrusi maritim tersebut juga diperparah dengan militerisasi Laut Tiongkok Selatan dan pulau-pulau di sekitarnya oleh RRT, di mana sebagaimana dinyatakan oleh Panglima Komando Pasifik AS, Laksamana John C. Aquilino, RRT telah menduduki dan memiliterisasi secara penuh tiga pulau di laut tersebut (Gomez & Favila 2022). Seiring dengan militerisasi tersebut, maka risiko pelanggaran wilayah udara Indonesia juga semakin besar, karena RRT juga menempatkan jet-jet tempur di wilayah tersebut. Maka, pembelian pesawat tempur baru ini merupakan implementasi dari dua instrumen *strategic hedging*, yakni (1) *soft balancing* dengan mengimbangi kekuatan jet tempur RRT di Laut Tiongkok Selatan yang meningkat; dan (2) *dominance denial*, sebagai upaya mencegah superioritas udara (*air superiority*) RRT terhadap ruang udara Indonesia penguasaan perairan Natuna Utara oleh kapal-kapal perang RRT.

Posisi Prancis di tengah Gejolak Geopolitik Indo-Pasifik

Pengadaan pesawat tempur bukanlah merupakan keputusan yang mudah dilakukan. Industri dirgantara Indonesia sendiri belum mampu membuat pesawat tempur secara mandiri, sehingga pengadaan pesawat tempur baru harus dilakukan secara impor (Yani & Montratama 2018). Menurut argumen Kinsella (1998), pelaksanaan impor sendiri membutuhkan sederet pertimbangan strategis, mulai dari seberapa besar kebutuhan alutsista yang harus dipenuhi, relasi dengan negara mitra, dan politik luar negeri negara mitra itu sendiri. Berdasarkan kerangka *strategic hedging*, pemilihan Prancis sebagai mitra Indonesia untuk membeli pesawat tempur baru dilandasi oleh sejumlah pertimbangan. Pertama, adalah relasi bilateral Prancis dengan AS dan RRT serta politik luar negeri Prancis. Prancis merupakan negara di Eropa yang memiliki relasi strategis dengan berbagai negara di dunia, termasuk AS dan RRT. Prancis telah lama menjadi sekutu strategis AS, di mana keduanya berada dalam satu blok NATO. Ketika Rusia menyerang Ukraina belakangan, keduanya juga terlibat dalam memberikan sanksi kepada Rusia (France24 2022).

Di sisi lain, Prancis nyatanya juga memiliki relasi yang baik dengan RRT, meskipun bukan dalam satu organisasi geopolitik formal. Sebagai contoh, di tengah perang dagang yang memanas antara RRT dan AS pada tahun 2019, Prancis menyepakati sejumlah kesepakatan dagang dengan RRT dengan nilai mencapai US\$ 32 miliar, dengan US\$ 1,2 miliar di antaranya berwujud kerja sama pembangunan energi terbarukan (France24 2019). Meskipun telah jauh berkurang, Prancis juga menjadi salah satu penyuplai terbesar alutsista kepada RRT, dengan nilai mencapai US\$ 1,7 miliar dalam satu dasawarsa terakhir atau 9% dari total impor alutsista RRT (SIPRI 2022). Contohnya, adalah helikopter antikapal selam AS 565 Panther yang kemudian diproduksi secara lisensi oleh RRT dengan nama Harbin Z-9 (Xue 2021).

Dalam konteks dinamika konflik AS-RRT di Indo-Pasifik, Prancis merupakan negara yang tidak memihak salah satu blok, berkaitan dengan posisinya dalam relasi AS-RRT di atas. Sebagai sekutu penting AS, Prancis tetap melaksanakan sejumlah program pertahanan bersama, seperti latihan bersama di kawasan tersebut. Misalnya, latihan bersama RIMPAC dan *Jeanne d'Arc*, di mana Prancis rutin mengirimkan kapal perangnya (Mahadzir 2021; Vavasseur 2022). Selain itu, Prancis juga terlibat dalam operasi FONOPS di Laut Tiongkok Selatan pada tahun 2018 untuk memastikan bahwa wilayah laut tersebut dapat dilayari secara terbuka dan bebas (*free and open*), guna mengamankan kepentingan strategisnya sendiri (Ingersoll 2021).

Alih-alih terlibat dalam ambisi geopolitik kedua negara besar tersebut, Prancis memilih untuk mendefinisikan konsep geopolitik Indo-Pasifiknya sendiri dalam yang tertuang dalam *La Stratégie de la France dans l'Indopacifique*—dokumen Strategi Indo-Pasifik Prancis. Strategi tersebut berlandaskan kemitraan dalam bidang keamanan maritim, ekonomi, pendidikan, riset, dan inovasi (French Ministry for Europe and Foreign Affairs, 2020). Di kawasan ini, Prancis telah menjalin kemitraan yang signifikan dengan India, Australia, dan Jepang dalam bidang-bidang tersebut. Negara tersebut juga memiliki teritorial di Indo-Pasifik, seperti Wallis dan Futuna, Reunion, Mayotte, Kaledonia Baru, Polinesia, dan Kepulauan Selatan dan Teritorial Antartika yang harus dilindungi secara geopolitik dan ekonomi. Hal ini menjadikan Prancis sebagai *balancing power* di antara AS dan RRT dengan upayanya mempromosikan multilateralisme, stabilitas kawasan, dan kerja sama di antara negara-negara Indo-Pasifik (Morcos 2021).

Kondisi ini penting bagi upaya *strategic hedging* Indonesia sebagai cara untuk menghindari keberpihakan di antara AS dan RRT. Dengan bermitra bersama Prancis yang relatif independen di Indo-Pasifik, maka Indonesia dapat terhindar dari persepsi negatif kedua kekuatan tersebut karena dianggap condong membela kepentingan salah satunya. Apalagi, pesawat tempur memiliki potensi penggentar yang strategis dan dapat dimanfaatkan untuk melawan—atau bahkan menyerang—posisi negara lawan. Terlebih, relasi bilateral antara Indonesia dengan Prancis terbilang strategis, di antaranya dengan kerja sama antara perusahaan Airbus dan PT Dirgantara Indonesia yang telah berlangsung selama lebih dari tiga dasawarsa. Praktis, Prancis menjadi mitra strategis yang penting di luar AS dan RRT untuk memperkuat posisi tawar Indonesia di kawasan sekaligus mendukung pengembangan industri pertahanan Indonesia.

Upaya Indonesia Menghindari Sanksi CAATSA

Pertimbangan berikutnya, adalah kebijakan *Countering America's Adversary Through Sanction Act* (CAATSA) yang diterbitkan AS sejak tahun 2017. Kebijakan ini menjadi salah satu instrumen diplomasi koersif AS untuk menekan lawan-lawan geopolitiknya (Prastiti 2019). Salah satu poin dari kebijakan tersebut adalah bahwa AS akan menjatuhkan sanksi kepada setiap negara yang membeli alutsista dari Iran, Rusia, dan Korea Utara. Salah satu negara yang menjadi korban adalah Turki pada tahun 2017, ketika negara tersebut membeli sistem pertahanan udara S-400 dari Rusia (Özgen *et al.* 2022). Hal ini perlu menjadi pertimbangan bagi Pemerintah Indonesia, mengingat ketergantungan Indonesia akan impor alutsista dan komponennya secara signifikan.

Laporan Laboratorium Indonesia 2045 (2021) mencatat bahwa pada tahun 2021, sebanyak 86% alutsista Indonesia berasal dari luar negeri. Dengan kemandirian yang masih rendah ini, risiko sektor pertahanan Indonesia untuk terpengaruh dinamika politik global cukup tinggi, termasuk dengan keberadaan CAATSA. Apalagi, Indonesia memiliki sejumlah besar alutsista dari AS yang membutuhkan perawatan dan penggantian komponen rutin. Praktis, Indonesia sebisa mungkin menghindari risiko tekanan sanksi CAATSA tersebut dengan menjalin kemitraan alternatif dengan negara-negara Barat yang merupakan sekutu AS, salah satunya yakni Prancis. Apalagi, mengingat keanggotaan Prancis dalam NATO, sebagian besar alutsista buatan Prancis telah kompatibel untuk bersinergi dengan alutsista buatan negara Barat lainnya, termasuk AS (Patterson 1999). Hal ini memungkinkan penggunaan senjata buatan AS yang telah dimiliki Indonesia oleh Dassault Rafale nantinya yang juga menjadi keuntungan lain bagi Indonesia.

Pragmatisme Prancis dalam Kemitraan Pertahanan

Pertimbangan terakhir adalah terkait dengan kompleksitas pembelian alutsista. Sebagaimana dinyatakan oleh Sudreau (2020), Prancis menjadi negara yang pragmatis dalam menjalin kemitraan strategis dengan negara lain. Hal ini tidak lepas dari implementasi identitas strategis Prancis yang menempatkan kepentingan negara dan kemandirian di atas tujuan nasional lainnya (*dirigiste*). Identitas strategis ini tercermin pada kebijakan ekspor alutsista Prancis yang relatif lebih bebas, karena sumbangannya yang signifikan terhadap perekonomian. Di Prancis, pemerintah melalui *Commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre/CIEEMG* (Komisi Antarkementerian untuk Studi Ekspor Persenjataan) mengontrol ekspor yang dilakukan oleh industri pertahanan.

Belum lagi, dalam dinamika pengambilan kebijakan pertahanan Prancis, kelompok penekan yang menentang produksi dan proliferasi senjata relatif kurang berpengaruh, membuat legitimasi negara dan kepentingan strategisnya cukup bertahan (Sudreau 2020). Hal ini berbeda dengan negara yang memiliki kultur politik lebih liberal seperti AS dan Inggris, di mana kelompok penekan dapat sewaktu-waktu melakukan *check and balance* terkait ekspor alutsista. Selain itu, nilai-nilai liberalisme seperti penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) cenderung menjadi prioritas di kedua negara tersebut, membuat ekspor alutsista menjadi jauh lebih selektif dan idealistik, dengan sederet prasyarat. Contohnya, adalah ketika AS, Inggris, dan Uni Eropa mengembargo Indonesia pada dasawarsa 1990-an seiring dengan operasi militer Indonesia di Timor Leste yang dipandang melanggar prinsip kemanusiaan dan HAM (Kerr 2006).

Maka dalam konteks *strategic hedging*, keputusan Indonesia untuk menggandeng Prancis dalam pengadaan pesawat tempur Rafale dan sebagai mitra strategis alternatif secara umum menjadi yang paling ideal. Apalagi, mempertimbangkan keterlibatan militer Indonesia dalam konflik di Papua yang dapat sewaktu-waktu dipandang “miring” oleh negara-negara Barat, khususnya AS dan Australia (McGibbon 2006). Selain menghindarkan Indonesia dari aneka prasyarat kompleks yang justru merugikan posisi Indonesia karena tidak dapat memanfaatkan alutsistanya secara maksimal, kemitraan tersebut juga meminimalisasi risiko embargo militer apabila pesawat tempur Rafale dipergunakan untuk hal-hal yang dipandang “kurang sesuai” dengan nilai-nilai yang dianut oleh Barat.

Hal ini juga diperkuat dalam transfer alutsista sebelumnya, di mana Prancis menjadi salah satu mitra yang paling signifikan. Berdasarkan data SIPRI (2022), antara tahun 2001 hingga 2021, Indonesia telah mengimpor alutsista senilai US\$ 631 juta dalam berbagai jenis, menempatkan Prancis sebagai eksportir alutsista terbesar kelima setelah Korea Selatan, Rusia, Belanda, dan AS. Contohnya, adalah helikopter angkut AS-532 Cougar, kendaraan tempur VAB, dan rudal antikapal MM-40 Exocet. Sebagian di antara alutsista tersebut bahkan telah dirakit di Indonesia oleh industri yang bersangkutan (Praditya 2019). Praktis, potensi akan intensi dari Prancis untuk melakukan intervensi yang destruktif terhadap relasi strategisnya dengan Indonesia relatif minim.

Prospek dan Keuntungan Pembelian Dassault Rafale

Di samping secara politik, sebagai sarana *dominance denial* (penentangan dominasi), pembelian pesawat tempur juga perlu mempertimbangkan keunggulan teknis untuk mengimbangi aset strategis lawan. Dengan wilayah pengawasan yang amat luas, ditambah dengan skenario ancaman yang berlangsung secara kontinu, maka TNI AU memerlukan pesawat

tempur yang memiliki kemampuan jelajah dan multiperan yang baik, serta mampu bersaing dengan teknologi militer negara-negara berkekuatan besar sebagai upaya *soft balancing*.

Dengan demikian, Dassault Rafale telah memenuhi syarat di atas. Pesawat tempur ini merupakan pesawat generasi 4.5 yang setingkat lebih canggih dibandingkan generasi 4, namun tidak sekompleks dan semahal generasi 5. Selain memiliki radar AESA yang menjadi “standar” bagi pesawat segenerasinya (Dassault Aviation 2022), Dassault Rafale juga memiliki kemampuan serang jarak jauh di atas jangkauan visual (*beyond visual range*) dengan dilengkapi rudal MBDA Meteor dengan jarak mencapai 200 kilometer (Machi 2021). Pesawat ini tidak hanya akan mengisi gap kemampuan tempur TNI AU, namun juga diharapkan dapat mengimbangi pesawat-pesawat tempur Angkatan Udara dan Angkatan Laut Pembebasan Rakyat RRT, khususnya yang ditempatkan di sekitar Laut Tiongkok Selatan. Di antaranya, adalah Shenyang J-11, Shenyang J-15, dan Shenyang J-16 yang juga merupakan pesawat tempur segenerasi (Grossman 2019).

Dassault Rafale memiliki peran penting dalam strategi antiakses/tangkal wilayah, terutama untuk memantau dan menangkal intrusi RRT dengan strategi *grey zone tactics*, juga aset-aset alutsista maritim AS dan sekutunya yang dapat melintasi wilayah laut dan udara Indonesia tanpa izin. Kemampuan antikapal yang mumpuni dengan aplikasi rudal antikapal Exocet pula membuat pesawat tempur ini menjadi pilihan dengan mempertimbangkan skenario potensi peperangan maritim. Dengan ditempatkan di sekitar Natuna, maka fungsi deterensi dan daya tangkal dari Rafale dapat terpenuhi secara maksimal.

Selain itu, prospek akan transfer teknologi juga menjadi pertimbangan Pemerintah Indonesia terkait pembelian Dassault Rafale. Dalam acara penandatanganan kesepakatan antara kedua negara, Menteri Angkatan Bersenjata Prancis Florence Parly menyatakan bahwa pembelian senilai US\$ 8,1 miliar itu juga diikuti dengan peningkatan kerja sama teknologi pertahanan bilateral (Hummel & Widiyanto 2022). Tidak hanya terkait industri kedirgantaraan, di mana Indonesia membutuhkan penguasaan teknologi pesawat tempur untuk membangun pesawat tempur mandiri, transfer teknologi tersebut juga akan menargetkan sektor kemaritiman. Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia sudah menyepakati kerja sama transfer teknologi dengan Naval Group untuk pengembangan teknologi kapal selam (Ramalan 2022).

Kesimpulan

Pembelian 42 unit Dassault Rafale dari Prancis merupakan langkah substantif dari *strategic hedging* yang dilakukan oleh Indonesia dalam menghadapi peningkatan tensi geopolitik di Indo-Pasifik. Sesuai dengan konsep *strategic hedging*, pembelian alutsista tersebut memiliki tujuan untuk memenuhi tiga pilar utama, yakni *soft balancing*, di mana Indonesia berupaya meningkatkan kekuatannya untuk mengimbangi ekspansi kekuatan lawan; *limited bandwagoning*, dalam bentuk peningkatan kerja sama strategis dengan Prancis; dan *dominance denial*, sebagai sarana untuk menentang dominasi kekuatan besar yang dapat mengancam kedaulatan wilayah Indonesia.

Pemilihan Prancis sebagai mitra strategis dalam pembelian pesawat tempur tersebut juga dilandasi oleh berbagai pertimbangan. Pertama, adalah posisi geopolitik Prancis di Indo-Pasifik yang relatif independen, bahkan mampu menjembatani relasi antara AS dan RRT yang tengah bergejolak. Kedua, adalah status Prancis sebagai negara anggota NATO yang dimanfaatkan Indonesia untuk menghindari tekanan akibat kebijakan CAATSA. Ketiga, adalah kompleksitas transfer alutsista yang relatif minim dan prospek kerja sama pertahanan bilateral yang terbuka dan menguntungkan. Maka, pemilihan Prancis sebagai mitra alternatif dilakukan Indonesia untuk menghindarkan diri dari pusaran ketegangan dan reaksi negatif di antara AS dan RRT, sekaligus untuk mencapai kepentingan nasional berupa kemandirian industri pertahanan.

Referensi

Buku dan Bab dalam Buku

- Freedman, Lawrence. 2021. "Introduction—The Evolution of Deterrence Strategy and Research." dalam Osinga, Frans dan Sweijs, Tim (ed.), 2021. *Netherlands Annual Review of Military Studies 2020*. The Hague: Asser Press.
- Grossman, Derek, 2019. "Military Build-Up in the South China Sea", dalam Buszynski, Leszek dan Hai, Don Thanh (ed.), 2019. *The South China Sea: From a Regional Maritime Dispute to Geo-Strategic Competition*. Routledge.
- McGibbon, Rodd, 2006. *Pitfalls of Papua: Understanding the Conflict and Its Place in Australia-Indonesia Relations*. Double Bay, N.S.W.: Longueville Books.
- Sudreau, Lucie Béraud, 2020. *French Arms Exports: The Business of Sovereignty*. London: Routledge.
- The International Institute for Strategic Studies, 2022. *The Military Balance 2022*. London: Routledge.
- Tribowo, Minggit, et.al., 2022. *Perisai Udara: Strategi Anti-Akses/Tangkal-Wilayah Udara Indonesia*. Malang: Intrans Publishing.

Artikel Jurnal

- Abrar, Muhammad Irsyad, dan Muhammad Daffa Syauqi. 2017. "Hedging Sebagai Strategi Indonesia untuk Menghadapi Klaim Cina di Laut Cina Selatan", *Indonesian Foreign Policy Review* 4:1–18.
- Cheng-Chwee, Kuik, 2008. "The Essence of Hedging: Malaysia and Singapore's Response to a Rising China", *Contemporary Southeast Asia*, 30(2):159–85.
- Choong, William, 2019, "The Return of the Indo-Pacific Strategy: An Assessment", *Australian Journal of International Affairs*, 73(5):415–30.
- Delanova, Mariane Olivia, 2021. "Dampak Pakta Pertahanan Trilateral AUKUS terhadap Kondisi Regional Indo-Pasifik", *Jurnal Dinamika Global*, 6(2):259–85.
- Kinsella, David, 1999. "Arms Transfer Dependence and Foreign Policy Conflict", *Journal of Peace Research*, 35(1):7–23.

Laporan Penelitian

Buchan, Patrick Gerard, dan Benjamin Rimland, 2020. “Defining the Diamond: The Past, Present, and Future of the Quadrilateral Security Dialogue”, *CSIS* 12, March.

Gindarsah, Iis, Curie Maharani, Reine Prihandoko, Febry Triantama, dan Guntur Lebang, 2021. “Dinamika Persenjataan Global dan Proyeksi Pembangunan Pertahanan Indonesia 2045”, *Laboratorium Indonesia 2045*.

RSIS Indonesia Programme, 2014. “Rethinking TNI AU’s Arms Procurement: A Long-run Projection”. *S. Rajaratnam School of International Studies*.

Dokumen Resmi

France’s Indo-Pacific Strategy, 2020. Paris: French Ministry for Europe and Foreign Affairs.

Artikel Online

Allard, Tom, et.al., 2021. “EXCLUSIVE China Protested Indonesian Drilling, Military Exercises” [Online]. Tersedia dalam <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/exclusive-china-protested-indonesian-drilling-military-exercises-2021-12-01/> [diakses pada 2 Agustus 2022].

Astungkoro, Ronggo, 2020. “Intip Kehebatan Rafale, Jet Tempur Incaran Prabowo” [Online]. Tersedia dalam <https://republika.co.id/share/qigmmz354> [diakses pada 1 Agustus 2022].

Dassault Aviation, 2022. “The Rafale Carries a Wide Range of Smart and Discrete Sensors” [Online]. Tersedia dalam <https://www.dassault-aviation.com/en/defense/rafale/a-wide-range-of-smart-and-discrete-sensors/> [diakses pada 11 Agustus 2022].

Fadli, 2019. “Indonesia Issues Protest to Beijing over Chinese Vessel Trespassing in Natuna” [Online]. Tersedia dalam <https://www.thejakartapost.com/news/2019/12/31/indonesia-issues-protest-to-beijing-over-chinese-vessel-trespassing-in-natuna.html> [diakses pada 11 Agustus 2022].

- Gomez, Jim, dan Aaron Favila, 2022. "AP Exclusive: US Admiral Says China Fully Militarized Isles" [Online]. Tersedia dalam <https://apnews.com/article/business-china-beijing-xi-jinping-south-china-sea-d229070bc2373be1ca515390960a6e6c> [diakses pada 9 Agustus 2022].
- Hummel, Tassilo, dan Stanley Widiyanto, 2022. "France Seals \$8.1 Billion Deal with Indonesia to Sell 42 Rafale Jets" [Online]. Tersedia dalam <https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/indonesia-orders-42-rafale-jets-french-defence-minister-says-2022-02-10/> [diakses pada 31 Juli 2022].
- Ingersoll, Keagan, 2021. "UK-France Joint Action Key to European Relevance in the Indo-Pacific" [Online]. Tersedia dalam <https://www.geopoliticalmonitor.com/deepening-french-uk-cooperation-in-the-indo-pacific/> [diakses pada 9 Agustus 2022].
- Laksmana, Evan A, 2021. "Indonesia's Response to China's Incursions in North Natuna Sea Unsatisfactory: Indonesian Academic" [Online]. Tersedia dalam <http://www.thinkchina.sg/indonesias-response-chinas-incursions-north-natuna-sea-unsatisfactory-indonesian-academic> [diakses pada 10 Agustus 2022].
- Machi, Vivienne, 2021. "German Air Force Declares Meteor Missile Ready for Eurofighter Fleet" [Online]. Tersedia dalam <https://www.defensenews.com/global/europe/2021/08/02/german-air-force-declares-meteor-missile-ready-for-eurofighter-fleet/> [diakses pada 11 Agustus 2022].
- Mahadzir, Dzirhan, 2021. "U.S. Begins Joint Exercise in Japan with French and Australian Navies" [Online]. Tersedia dalam <https://news.usni.org/2021/05/13/u-s-begins-joint-exercise-in-japan-with-french-and-australian-navies> [diakses pada 8 Agustus 2022].
- Morcos, Pierre, 2021. "France: A Bridge between Europe and the Indo-Pacific?" [Online] Tersedia dalam <https://www.csis.org/analysis/france-bridge-between-europe-and-indo-pacific> [diakses pada 8 Agustus 2022]. Panda, Ankit. 2016. "Indonesia Summons Chinese Ambassador After South China Sea Stand-Off Near Natuna Islands." Diambil 12 Agustus 2022 (<https://thediplomat.com/2016/03/indonesia-summons-chinese-ambassador-after-south-china-sea-stand-off-near-natuna-islands/>).

- Allard, Tom, et.al., 2021. "EXCLUSIVE China Protested Indonesian Drilling, Military Exercises" [Online]. Tersedia dalam <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/exclusive-china-protested-indonesian-drilling-military-exercises-2021-12-01/> [diakses pada 2 Agustus 2022].
- Astungkoro, Ronggo, 2020. "Intip Kehebatan Rafale, Jet Tempur Incaran Prabowo" [Online]. Tersedia dalam <https://republika.co.id/share/qigmmz354> [diakses pada 1 Agustus 2022].
- Dassault Aviation, 2022. "The Rafale Carries a Wide Range of Smart and Discrete Sensors" [Online]. Tersedia dalam <https://www.dassault-aviation.com/en/defense/rafale/a-wide-range-of-smart-and-discrete-sensors/> [diakses pada 11 Agustus 2022].
- Fadli, 2019. "Indonesia Issues Protest to Beijing over Chinese Vessel Trespassing in Natuna" [Online]. Tersedia dalam <https://www.thejakartapost.com/news/2019/12/31/indonesia-issues-protest-to-beijing-over-chinese-vessel-trespassing-in-natuna.html> [diakses pada 11 Agustus 2022].
- Gomez, Jim, dan Aaron Favila, 2022. "AP Exclusive: US Admiral Says China Fully Militarized Isles" [Online]. Tersedia dalam <https://apnews.com/article/business-china-beijing-xi-jinping-south-china-sea-d229070bc2373be1ca515390960a6e6c> [diakses pada 9 Agustus 2022].
- Hummel, Tassilo, dan Stanley Widiyanto, 2022. "France Seals \$8.1 Billion Deal with Indonesia to Sell 42 Rafale Jets" [Online]. Tersedia dalam <https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/indonesia-orders-42-rafale-jets-french-defence-minister-says-2022-02-10/> [diakses pada 31 Juli 2022].
- Ingersoll, Keagan, 2021. "UK-France Joint Action Key to European Relevance in the Indo-Pacific" [Online]. Tersedia dalam <https://www.geopoliticalmonitor.com/deepening-french-uk-cooperation-in-the-indo-pacific/> [diakses pada 9 Agustus 2022].
- Laksmana, Evan A, 2021. "Indonesia's Response to China's Incursions in North Natuna Sea Unsatisfactory: Indonesian Academic" [Online]. Tersedia dalam <http://www.thinkchina.sg/indonesias-response-chinas-incursions-north-natuna-sea-unsatisfactory-indonesian-academic> [diakses pada 10 Agustus 2022].

- Hofilena, Saul, 2022. "The Manila Times." [Online] *Interpol, the Red Notices and Philippine Extradition Treaties*. In <https://www.manilatimes.net/2022/10/08/opinion/columns/interpol-the-red-notice-and-philippine-extradition-treaties/1861413> [Retrieved December 31, 2022].
- Allard, Tom, et.al., 2021. "EXCLUSIVE China Protested Indonesian Drilling, Military Exercises" [Online]. Tersedia dalam <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/exclusive-china-protested-indonesian-drilling-military-exercises-2021-12-01/> [diakses pada 2 Agustus 2022].
- Astungkoro, Ronggo, 2020. "Intip Kehebatan Rafale, Jet Tempur Incaran Prabowo" [Online]. Tersedia dalam <https://republika.co.id/share/qigmmz354> [diakses pada 1 Agustus 2022].
- Dassault Aviation, 2022. "The Rafale Carries a Wide Range of Smart and Discrete Sensors" [Online]. Tersedia dalam <https://www.dassault-aviation.com/en/defense/rafale/a-wide-range-of-smart-and-discrete-sensors/> [diakses pada 11 Agustus 2022].
- Fadli, 2019. "Indonesia Issues Protest to Beijing over Chinese Vessel Trespassing in Natuna" [Online]. Tersedia dalam <https://www.thejakartapost.com/news/2019/12/31/indonesia-issues-protest-to-beijing-over-chinese-vessel-trespassing-in-natuna.html> [diakses pada 11 Agustus 2022].
- Gomez, Jim, dan Aaron Favila, 2022. "AP Exclusive: US Admiral Says China Fully Militarized Isles" [Online]. Tersedia dalam <https://apnews.com/article/business-china-beijing-xi-jinping-south-china-sea-d229070bc2373be1ca515390960a6e6c> [diakses pada 9 Agustus 2022].
- Hummel, Tassilo, dan Stanley Widiyanto, 2022. "France Seals \$8.1 Billion Deal with Indonesia to Sell 42 Rafale Jets" [Online]. Tersedia dalam <https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/indonesia-orders-42-rafale-jets-french-defence-minister-says-2022-02-10/> [diakses pada 31 Juli 2022].
- Ingersoll, Keagan, 2021. "UK-France Joint Action Key to European Relevance in the Indo-Pacific" [Online]. Tersedia dalam <https://www.geopoliticalmonitor.com/deepening-french-uk-cooperation-in-the-indo-pacific/> [diakses pada 9 Agustus 2022].

- Laksmana, Evan A, 2021. "Indonesia's Response to China's Incursions in North Natuna Sea Unsatisfactory: Indonesian Academic" [Online]. Tersedia dalam <http://www.thinkchina.sg/indonesias-response-chinas-incursions-north-natuna-sea-unsatisfactory-indonesian-academic> [diakses pada 10 Agustus 2022].
- Machi, Vivienne, 2021. "German Air Force Declares Meteor Missile Ready for Eurofighter Fleet" [Online]. Tersedia dalam <https://www.defensenews.com/global/europe/2021/08/02/german-air-force-declares-meteor-missile-ready-for-eurofighter-fleet/> [diakses pada 11 Agustus 2022].
- Mahadzir, Dzirhan, 2021. "U.S. Begins Joint Exercise in Japan with French and Australian Navies" [Online]. Tersedia dalam <https://news.usni.org/2021/05/13/u-s-begins-joint-exercise-in-japan-with-french-and-australian-navies> [diakses pada 8 Agustus 2022].
- Morcos, Pierre, 2021. "France: A Bridge between Europe and the Indo-Pacific?" [Online] Tersedia dalam <https://www.csis.org/analysis/france-bridge-between-europe-and-indo-pacific> [diakses pada 8 Agustus 2022]. Panda, Ankit. 2016. "Indonesia Summons Chinese Ambassador After South China Sea Stand-Off Near Natuna Islands." Diambil 12 Agustus 2022 (<https://thediplomat.com/2016/03/indonesia-summons-chinese-ambassador-after-south-china-sea-stand-off-near-natuna-islands/>).
- Mahadzir, Dzirhan, 2021. "U.S. Begins Joint Exercise in Japan with French and Australian Navies" [Online]. Tersedia dalam <https://news.usni.org/2021/05/13/u-s-begins-joint-exercise-in-japan-with-french-and-australian-navies> [diakses pada 8 Agustus 2022].
- Morcos, Pierre, 2021. "France: A Bridge between Europe and the Indo-Pacific?" [Online] Tersedia dalam <https://www.csis.org/analysis/france-bridge-between-europe-and-indo-pacific> [diakses pada 8 Agustus 2022]. Panda, Ankit. 2016. "Indonesia Summons Chinese Ambassador After South China Sea Stand-Off Near Natuna Islands." Diambil 12 Agustus 2022 (<https://thediplomat.com/2016/03/indonesia-summons-chinese-ambassador-after-south-china-sea-stand-off-near-natuna-islands/>).
- Permana, Erric, 2021. "KSAU: Pelanggaran ruang udara oleh pesawat militer asing di Indonesia meningkat" [Online]. Tersedia dalam <https://www.aa.com.tr/id/nasional/ksau-pelanggaran-ruang-udara-oleh-pesawat-militer-asing-di-indonesia-meningkat/2261229> [diakses pada 1 Agustus 2022].

- Panda, Ankit, 2016. "Indonesia Summons Chinese Ambassador After South China Sea Stand-Off Near Natuna Islands" [Online]. Tersedia dalam <https://thediplomat.com/2016/03/indonesia-summons-chinese-ambassador-after-south-china-sea-stand-off-near-natuna-islands/> [diakses pada 10 Agustus 2022].
- Praditya, Ilyas Istianur, 2019. "Intip Kehebatan Helikopter AS565 MBe Panther Buatan PT DI" [Online]. Tersedia dalam <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3880590/intip-kehebatan-helikopter-as565-mbe-panther-buatan-pt-di> [diakses pada 2 Agustus 2022].
- Ramalan, Suparjo, 2022. "Modernisasi Alutsista, PAL Indonesia Gandeng Naval Group Asal Prancis" [Online]. Tersedia dalam <https://www.idxchannel.com/economics/modernisasi-alutsista-pal-indonesia-gandeng-naval-group-asal-prancis> [diakses pada 11 Agustus 2022].
- Stockholm International Peace Research Institute, 2021. "TIV of arms exports to Indonesia, 2001-2021" [Online]. Tersedia dalam https://armstrade.sipri.org/armstrade/html/export_values.php [diakses pada 9 Agustus 2022].
- Stockholm International Peace Research Institute, 2021. "TIV of arms exports to China, 2011-2021" [Online]. Tersedia dalam https://armstrade.sipri.org/armstrade/html/export_values.php [diakses pada 9 Agustus 2022].
- TNI Angkatan Udara, 2020. "Tiga Skadron Udara Tempur Lanud Iswahjudi Latihan Pertempuran Udara Malam Hari" [Online]. Tersedia dalam <https://tni-au.mil.id/tiga-skadron-udara-tempur-lanud-iswahjudi-latihan-pertempuran/> [diakses pada 6 Agustus 2022].
- Vavasseur, Xavier, 2022. "French Navy Plans on Sending FREMM Frigate to Next RIMPAC" [Online]. Tersedia dalam <https://www.navalnews.com/naval-news/2022/06/french-navy-plans-on-sending-fremm-frigate-to-next-rimpac/> [diakses pada 11 Agustus 2022].
- Waldron, Greg, 2020. "Singapore's Air Force Eyes Long-Term Challenges" [Online]. Tersedia dalam <https://www.flightglobal.com/singapore-air-show-2020/singapores-air-force-eyes-long-term-challenges/136127.article> [diakses pada 11 Agustus 2022].
- Xue, Maryann, 2021. "How China Grew from Buyer to Major Arms Trade Player" [Online]. Tersedia dalam <https://www.scmp.com/news/china/military/article/3139603/how-china-grew-buyer-major-arms-trade-player> [diakses pada 9 Agustus 2022].

- Yahya, Achmad Nasrudin, 2020. “Program upgrade sukses, TNI AU punya F-16 canggih setara pesawat paling baru” [Online]. Tersedia dalam <https://nasional.kontan.co.id/news/program-upgrade-sukses-tni-au-punya-f-16-canggih-setara-pesawat-paling-baru> [diakses pada 11 Agustus 2022].
- Yuniar, Resty Woro, 2022, “‘Balancing China’: Why Indonesia’s Spending Billions on US, French Jets” [Online]. Tersedia dalam <https://www.scmp.com/week-asia/politics/article/3168277/balancing-china-why-indonesia-multibillion-dollar-spending-spree> [diakses pada 11 Agustus 2022].